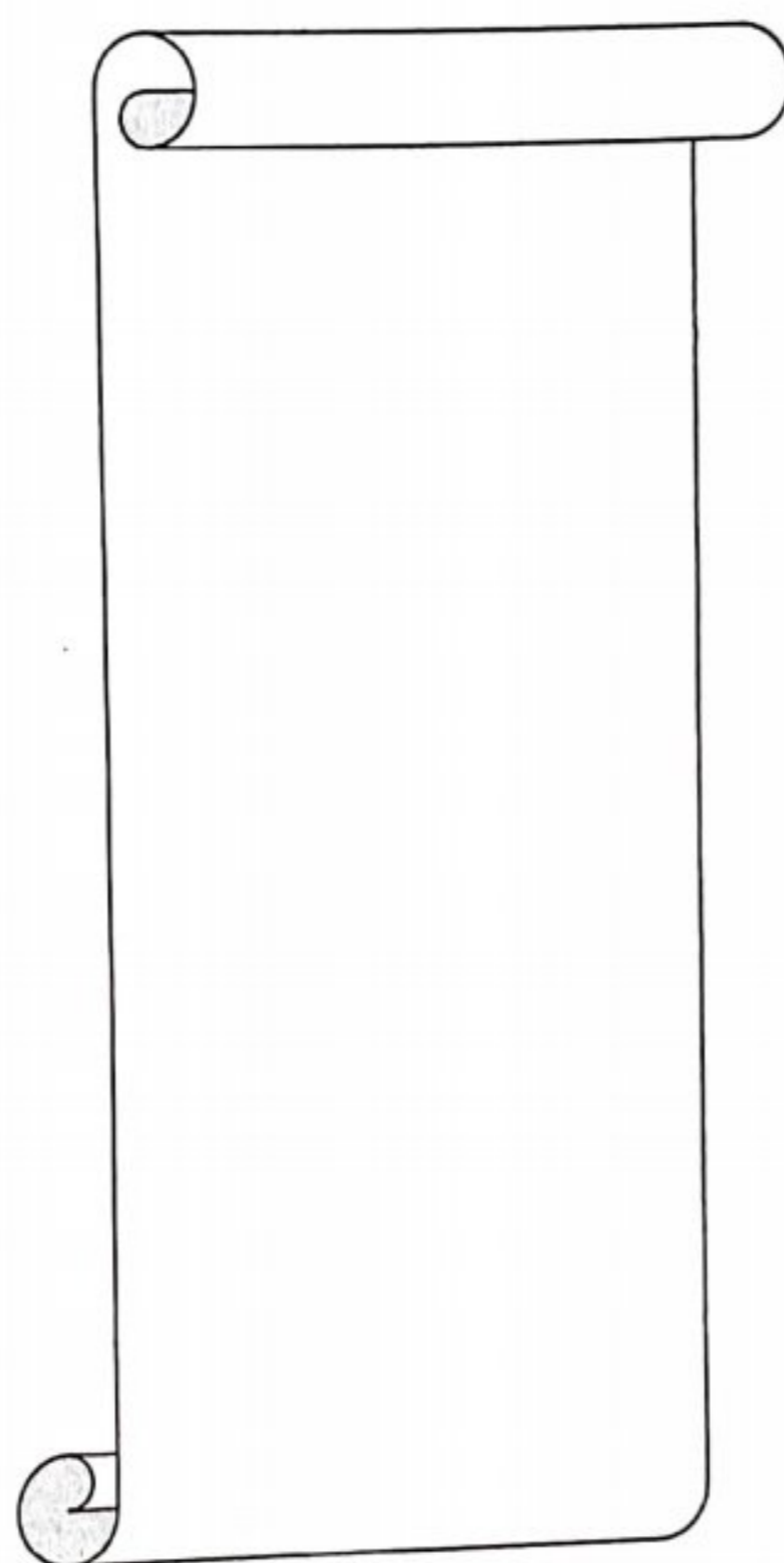


**PERATURAN KALURAHAN KELOR NOMOR 6  
TAHUN 2023 TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH KALURAHAN KELOR  
KAPANEWON KARANGMOJO KABUPATEN  
GUNUNGKIDUL  
TAHUN 2023**



LURAH KELOR  
KAPANEWON KARANGMOJOKABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN KELOR  
NOMOR 06 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH KELOR,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Kelor Nomor 7 Tahun 2023;
  - b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
  - c. Bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 telah mendapatkan evaluasi sesuai dengan Keputusan Kapanewon Karangmojo Nomor 40 / KPTS / 2023, tertanggal 27 Desember 2023;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No.44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



- 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759); Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
  10. Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);



11. Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 52);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
18. Peraturan Desa Kelor Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kelor Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Kelor Tahun 2018 Nomor 8);
19. Peraturan Desa Kelor Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Kelor Tahun



2019 Nomor3);

20. Peraturan Kalurahan Kelor Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Kelor Tahun 2023 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KELOR  
dan  
LURAH KELOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN  
ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	2.015.370.000,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	2.153.629.937,50
Surplus/Defisit	Rp	(138.259.237,50)
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	172.859.237,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	34.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	138.259.237,50
SilPA Tahun Berjalan	Rp	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.



### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. Daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. Daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

### Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

### Pasal 5

- 1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- 3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksise sebelumnya;
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Kalurahan.

### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;



- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

#### Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Kelor

Ditetapkan di Kelor

Pada tanggal 29 Desember 2023

LURAHKELOR,



Diundangkan di Kelor

Pada tanggal 30 Desember 2023

CARIK KELOR,

SETYAWATI

LEMBARAN KALURAHAN KELOR TAHUN 2023 NOMOR 06



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN KELOR  
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	18.450.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.978.720.700,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	18.200.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.015.370.700,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	663.178.060,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	937.983.350,50	
5.3.	Belanja Modal	425.103.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	127.365.527,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.153.629.937,50</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(138.259.237,50)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	172.859.237,50	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	172.859.237,50	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	34.600.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	34.600.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>138.259.237,50</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Wonosari, 08 January 2024





ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN KELOR  
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	18.450.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.978.720.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	18.200.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.015.370.700,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
1		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>989.928.819,50</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>773.656.050,50</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	48.528.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	48.528.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	521.320.200,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	521.320.200,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	36.982.080,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	36.982.080,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	59.407.950,50	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.407.950,50	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	56.347.780,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	56.347.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.280.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.280.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	22.437.540,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.437.540,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	26.352.500,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.352.500,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>29.408.087,00</b>	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	19.808.087,00	ADD
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.808.087,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	2.000.000,00	ADD
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4.000.000,00	ADD



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	3.600.000,00	ADD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>33.415.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	21.940.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.940.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	1.425.000,00	DDS
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.425.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	10.050.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.050.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>143.449.682,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	125.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	125.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	2.092.800,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.092.800,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.125.000,00	ADD, PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.125.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	16.630.000,00	DDS, PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.130.000,00	
1.4.05	5.3.	Belanja Modal	500.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.350.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.350.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	21.687.500,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.687.500,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	70.239.382,00	PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.239.382,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	29.200.000,00	PBH
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.200.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>10.000.000,00</b>	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	5.000.000,00	PBH
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.000.000,00	DLL
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>531.899.386,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>61.080.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	24.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	31.000.000,00	DDS
2.1.02	5.3	Belanja Modal	31.000.000,00	
2.1.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	400.000,00	DDS
2.1.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	5.680.000,00	DDS
2.1.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.680.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>142.846.386,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	58.405.000,00	DDS
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	58.405.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	27.900.000,00	DDS
2.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	27.900.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	20.126.386,00	DDS
2.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	20.126.386,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	1.125.000,00	DDS
2.2.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.125.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	2.980.000,00	DDS
2.2.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.980.000,00	
2.2.92		Pembinaan taman obat keluarga (Toga)	4.025.000,00	DDS
2.2.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.025.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	1.800.000,00	DDS
2.2.94	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	1.225.000,00	DDS
2.2.96	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.225.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	25.260.000,00	DDS
2.2.98	5.2	Belanja Barang dan Jasa	25.260.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>200.643.000,00</b>	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	59.405.000,00	DDS
2.3.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	59.405.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	141.238.000,00	DDS, PBK
2.3.14	5.3	Belanja Modal	141.238.000,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>21.400.000,00</b>	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah *)	21.400.000,00	DDS
2.4.16	5.2	Belanja Barang dan Jasa	21.400.000,00	
2.5.		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>2.960.000,00</b>	
2.5.92		Rehabilitasi kawasan/lahan kritis desa	2.960.000,00	DDS
2.5.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.960.000,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>12.320.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	12.320.000,00	DDS



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.320.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.8.		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>90.650.000,00</b>	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	90.650.000,00	DDS
2.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.200.000,00	
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	74.450.000,00	
3		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>220.726.205,00</u></b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>13.102.486,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	6.310.000,00	ADD. PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.310.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	3.175.000,00	ADD
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.175.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	3.617.486,00	DLL
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.617.486,00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>9.246.219,00</b>	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	2.700.000,00	ADD. PBH
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	1.546.219,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.546.219,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	5.000.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>181.600.000,00</b>	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	175.000.000,00	PBP
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.085.000,00	
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	165.915.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	6.600.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>16.777.500,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.650.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	5.577.500,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.577.500,00	
3.4.94		Pembinaan RT/RW	1.850.000,00	PAD, PBH
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.850.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	1.300.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	6.400.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>		
4.1.		<b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>	<b>283.710.000,00</b>	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	81.975.000,00	
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.050.000,00	DDS
4.1.91		Pembinaan kelompok perikanan darat	72.050.000,00	
4.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.925.000,00	DDS
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>9.925.000,00</b>	
4.2.91		Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan	101.525.000,00	
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.825.000,00	DDS
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	4.825.000,00	
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	84.300.000,00	DDS
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	84.300.000,00	
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.400.000,00	DDS
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>12.400.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4.742.500,00	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.950.000,00	DDS
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	3.950.000,00	
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	792.500,00	DDS
4.4.		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>792.500,00</b>	
4.4.93		Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak	48.625.000,00	
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.425.000,00	DDS
4.4.95		Pembinaan dan pemberdayaan kelompok rentan	42.425.000,00	
4.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	DDS
4.4.96		Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	3.100.000,00	
4.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	DDS
4.5.		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>24.475.000,00</b>	
4.5.91		Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyarakat tingkat desa	24.475.000,00	
4.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.475.000,00	DDS
4.5.99		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	10.000.000,00	
4.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	DDS
4.6.		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>19.755.000,00</b>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	19.755.000,00	
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.755.000,00	DDS
4.7.		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>2.612.500,00</b>	
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	2.200.000,00	
4.7.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	DDS
4.7.92		Pembinaan/pelatihan pengelolaan pasar desa	412.500,00	
4.7.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	412.500,00	DDS
5		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</b>	<b>127.365.527,00</b>	



REKENING	1	2	3	4	5
				ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
5.1.			Sub Bidang Penanggulangan Bencana		
5.1.00			Kegiatan Penanggulangan Bencana		
5.1.00	5.4.		Belanja Tidak Terduga	61.665.527,00	
5.2.			Sub Bidang Keadaan Darurat	61.665.527,00	DDS
5.2.00			Penanganan Keadaan Darurat	61.665.527,00	
5.2.00	5.4.		Belanja Tidak Terduga	11.700.000,00	
5.3.			Sub Bidang Keadaan Mendesak	11.700.000,00	DLL
5.3.00			Penanganan Keadaan Mendesak	11.700.000,00	
5.3.00	5.4.		Belanja Tidak Terduga	54.000.000,00	
			<b>JUMLAH BELANJA</b>	54.000.000,00	DDS
			<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	2.153.629.937,50	
6.			<b>PEMBIAYAAN</b>	(138.259.237,50)	
6.1.			Penerimaan Pembiayaan		
6.2.			Pengeluaran Pembiayaan	172.859.237,50	
			<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	34.600.000,00	
			<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	138.259.237,50	
				0,00	

Wonosari, 08 January 2024





KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
	<b>PENDAPATAN</b>			
	<b>Pendapatan Asli Desa</b>			
	<b>Hasil Usaha Desa</b>			2 015 370 700,00
	Bagi Hasil BUMDes			18 450 000,00
	01. Bagi Hasil Bumkal			3 000 000,00
	<b>Hasil Aset Desa</b>			3 000 000,00
	Hasil Kios Milik Desa			3 000 000,00
	01. Sewa Kios Pasar Wage			4 500 000,00
	02. Sewa los OGK			4 500 000,00
	<b>Lain-Lain Pendapatan Asli Desa</b>			
	Hasil Pungutan Desa			2 000 000,00
	01. Penguburan di tanah kas desa (warga Kelor)			10 950 000,00
	02. Penguburan dintanah kas desa (warga Luar Kelor)			4 250 000,00
	Hasil pengelolaan tanah kas desa			500 000,00
	01. SD EX Kelor			3 750 000,00
	02. TK PKK			6 700 000,00
	03. SD Slametan			5 000 000,00
	04. Rumah dinas EX SD Kelor			200 000,00
	<b>Pendapatan Transfer</b>			
	<b>Dana Desa</b>			
	Dana Desa			887 161 000,00
	01. Dana Desa			887 161 000,00
	<b>Bagi Hasil Pajak dan Retribusi</b>			
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			68 700 800,00
	01. Bagi hasil Pajak			68 700 800,00
	02. Bagi hasil Retribusi			
	<b>Alokasi Dana Desa</b>			
	Alokasi Dana Desa			739 437 400,00
	01. ADD			739 437 400,00
	<b>Bantuan Keuangan Provinsi</b>			
	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			175 000 000,00
	01. BKK PROP			175 000 000,00
	<b>Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota</b>			
	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			108 421 500,00
	01. BKK PILUR			68 421 500,00
	02. BKK Fisik			40 000 000,00
	<b>Pendapatan Lain-lain</b>			
	<b>Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa</b>			18 200 000,00
				5 000 000,00



RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA/  
PEMERINTAH KALURAHAN KELOR KAPANEWON KARANGMOJO  
TAHUN ANGGARAN 2024

APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
		3	4	5
433.01	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa			
	01. Sumbangan RSPR	DLL		5 000 000,00
	02. Parkir RSPR	DLL		2 000 000,00
434	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga			3 000 000,00
	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga			11.700.000,00
434.01	01. Surplus UPK	DLL		11 700 000,00
436	Bunga Bank			11 700 000,00
	Bunga Bank			1.500.000,00
436.01	01. Bunga Bank	DLL		1 500 000,00
				1 500 000,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>			<b>2.015.370.700,00</b>



Wonosari, 08 January 2024

Carik

Setyawati, S.Pd



**RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DESA  
PEMERINTAH KALURAHAN KELOR KAPANEWON KARANGMOJO  
TAHUN ANGGARAN 2024**

APBDes Awal

URAIAN 2	ANGGARAN		
	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
	3	4	5
<b>PEMBIAYAAN</b>			<u>172.859.237,50</u>
Penerimaan Pemblayaan			172.859.237,50
SILPA Tahun Sebelumnya			172.859.237,50
SILPA Tahun Sebelumnya			
ADD	1 Ls	6.668.587,50	6.668.587,50
DDS	1 Ls	138.776.413,00	138.776.413,00
DLL	1 Ls	2.117.486,00	2.117.486,00
PAD	1 Ls	10.262.619,00	10.262.619,00
PBH	1 Ls	13.216.250,00	13.216.250,00
PBK	1 Ls	1.817.882,00	1.817.882,00
			<u>34.600.000,00</u>
Pengeluaran Pemblayaan			34.600.000,00
Penyertaan Modal Desa			34.600.000,00
Penyertaan Modal Desa	DDS	1 Ls	34.600.000,00
02. Penyertaan modal bumdes			138.259.237,50

**PEMBIAYAAN NETTC**

Wonosari, 08 January 2024

Carik

*[Signature]*  
Setyawati, S.Pd

